



## 100 Persen Terapkan Siskeudes

**PONTIANAK** - Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah (PLP) Keamanan dan Pertahanan BPKP Pusat, Doddy Setiadi memuji penerapan pelaporan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kalimantan Barat. Menurutnya, sudah 100 persen desa di Kalbar menerapkan pelaporan dengan aplikasi ini. "Hanya 10 provinsi di Indonesia yang sudah semuanya memakai sistem ini. Kalbar adalah salah satu yang terbaik," ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin (10/5).

Aplikasi ini, kata dia, merupakan upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempermudah para aparat desa dalam melakukan pembukuan Dana Desa. Dia memaparkan, aplikasi ini dibikin dari hasil diskusi BPKP bersama DPR Komisi XI, KPK dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) serta dari arahan Presiden Joko Widodo, untuk membuat semacam aplikasi untuk layanan laporan keuangan Pemdes.

"Dimana berdasarkan dari amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa agar dapat berajalan dengan baik, maka dari

itu kita membuatnya," ujar dia.

Adapun layanan keuangan ini dibuat, kata Doddy, dalam rangka mempermudah, arah pelaksanaan pemdes dalam mengelola keuangannya.

"Caranya cukup mudah, hanya cukup diinstal melalui note book atau laptop mereka sudah bisa memprosesnya dengan baik dan bisa menghasilkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam tata kelola keuangan desanya," terangnya.

Dengan harapan, hadirnya aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemdes sebaik mungkin, terlebih diketahui bahwa dari sisi latar belakang pendidikan dari aparat desa ini tidak semua sama.

"Latar belakang pendidikan mereka ada yang memadai ada yang tidak, sehingga dalam membuat desain melalui siskeudes ini juga mendasar pada kepaktrisan dalam pelaksanaannya, lebih kepada kemudahan, termasuk juga bahwa sarana dan prasaran yang digunakan," jelasnya.

Hanya saja kata Doddy untuk implikasinya di lapangan sendiri, tentu tidak serta merta dapat dilakukan BPKP, sebab kewenangan dari tenespelaksana tata

kelola pemdes berada dibawah kemedagri dan kemendes.

"Kita harus memperoleh semacam amanah atau kesepahaman dengan mereka dalam menetapkan apa yang menjadi hasil final dari siskeudes tersebut, sehingga kita juga berharap menjalankan amanah dengan baik," imbuhnya.

"Sebab yang jadi target ini adalah dikaitkan bahwa laporan keuangan desa juga menjadi bagian dari laporan keuangan Pemdanya, dalam bentuk penyajian laporan keuangan daerah, sehingga dengan lenkaapknya laporan pemdes ini juga jadi objek dari audit BPK juga, sehingga kita harapkan bisa berjalan," tutur dia.

Dia juga meminta para Kades untuk mengelola Dana Desa dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan kemajuan ekonomi desa.

"Kalau Kades bermasalah dalam pengelolaan dana desa sehingga terjerat hukum karena tidak menggunakan dana desa dengan baik kan itu merugikan negara dan masyarakat. Kita dan semua itu terjadi. Mari manfaatkan dana desa dengan baik," pungkasnya. (ars)